

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN BONANG**

**Rafi'atus Safira Alfath<sup>1</sup>, Afifuddin<sup>2</sup>, Taufiq Rahman Ilyas<sup>3</sup>**

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam*

*Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*E-mail: [safiraalfath99@gmail.com](mailto:safiraalfath99@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Wisata Religi Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengadopsi model kolaborasi Ansell dan Gash (2018) yang melibatkan empat indikator: kondisi awal, fasilitas kepemimpinan, desain institusional, dan proses kolaboratif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, yayasan pengelola wisata, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance berperan signifikan dalam keberlangsungan sejarah awal untuk mengkaji ketimpangan sumber daya dari kolaborasi yang dijalankan, penyediaan fasilitas wisata yang memadai, adanya desain intuitif yang ditampakkan pada adanya aturan dari kedua belah pihak, dan berjalannya proses kolaborasi yang ditunjukkan dengan adanya rapat koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, masalah kemacetan akibat mobilitas becak wisata, dan aktivitas pemalakan yang dilakukan oleh pengemis dan penjual parfum di sekitar wisata sunan bonang. Faktor pendukung keberhasilan kolaborasi meliputi: antusias masyarakat yang mampu memacu ekonomi lokal, adanya fasilitas yang memadai serta sumber dana yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran masing-masing aktor dalam proses kolaboratif, pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, dan penyempurnaan mekanisme retribusi untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan destinasi wisata serupa di wilayah lain, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.*

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance, Wisata Religi, Kesejahteraan Masyarakat*

### **Pendahuluan**

Setiap kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk menghilangkan stres dengan menikmati pemandangan yang ditawarkan oleh destinasi wisata disebut pariwisata (Hariadi, 2019:1). Menurut (Maryani, Muchsin, & Ilyas, 2021:58), salah satu sumber pendapatan negara adalah pariwisata. Dengan demikian, pariwisata didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pariwisata memberikan dampak terhadap perekonomian dalam beberapa hal, meliputi unsur-unsur sektor pariwisata, aspek-aspek pengembangan pariwisata, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, yang mampu menghasilkan outcome berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Yakup, 2019).

Pada literatur yang dikaji oleh (Hutami, 2022), menyebutkan bahwa pariwisata yang ada pada suatu daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Untuk mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan sah. Hal ini dikarenakan saat ini sektor wisata merupakan sektor yang dijadikan sebagai kebutuhan bagi masyarakat sehingga *trend* akan kegiatan pariwisata berdampak bagi wilayah yang dikenai oleh pariwisata tersebut. Dampak wilayah yang merasakan perkembangan sektor wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi pariwisata di wilayah Jawa Timur yang mana menjadi salah satu wilayah

Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai wisatawan nusantara dengan kunjungan terbanyak terhitung pada Januari hingga Juni 2023.

**Tabel 1.1. Fluktuasi Kunjungan Wisatawan Domestik Semester 1 2023**

| No. | Provinsi         | Nilai/Kunjungan |
|-----|------------------|-----------------|
| 1.  | Jawa Timur       | 116.702.650     |
| 2.  | Jawa Barat       | 75.460.440      |
| 3.  | Jawa Tengah      | 63.098.430      |
| 4.  | DKI Jakarta      | 30.072.770      |
| 5.  | Banten           | 20.814.960      |
| 6.  | D.I Yogyakarta   | 16.117.640      |
| 7.  | Sumatera Utara   | 14.333.140      |
| 8.  | Sulawesi Selatan | 14.323.410      |
| 9.  | Bali             | 9.719.510       |
| 10. | Sumatera Barat   | 7.745.590       |

Sumber : (databoks.katadata.co.id, 2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh (databoks.katadata.co.id, 2023), wisatawan domestik melakukan perjalanan domestik sebanyak 433,57 juta perjalanan pada semester I tahun 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,57% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebanyak 385,16 juta perjalanan. Jawa Timur menjadi destinasi yang paling diminati wisatawan domestik dengan jumlah kunjungan sebanyak 116,70 juta kunjungan dan menyumbang 26,92% dari total perjalanan wisatawan domestik. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur pada Juli 2023 meningkat sebesar 12,64% dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 18.025 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022, arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur meningkat sebesar 233,55%, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2022 mencapai 18.025 kunjungan (BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2023).

Sehingga capaian PAD pada tahun 2023 pada setor wisata memiliki kenaikan sebesar 4.66 Triliun yang mana pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur hanya mencapai 21.26 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2023 PAD pariwisata Provinsi Jawa Timur mencapai 487 Triliun rupiah (radarbanyuwangi.jawapos.com, 2023). Melonjaknya minat wisatawan untuk mengunjungi beragam objek wisata di daerah ini tentu akan menambah pemasukan dan membantu pertumbuhan daerah.

Pariwisata cenderung memiliki sifat kompleks dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam pengelolaan pariwisata perlu adanya tata kelola kolaborasi pemerintahan (*collaborative governancet*) melalui beberapa stakeholder lain Untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, diperlukan kemitraan antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat (Hariadi,

2019:2). Pariwisata merupakan sektor integratif yang tidak dapat bertahan tanpa tata kelola kolaboratif dan kerja sama dari beberapa pemangku kepentingan. Integrasi ini mencakup kegiatan pariwisata penting termasuk penawaran gastronomi, suvenir, aksesibilitas, dan transportasi, antara lain. Penting untuk disebutkan bahwa perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekosistem ini dengan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan pengalaman wisatawan bagi pengunjung yang ingin menikmati tempat wisata. (Imaniar & Wahyudiono, 2019). Sehingga dalam aspek *collaborative governance* terdapat beberapa elemen penting yang ada di dalamnya mulai dari aktor pelaksana serta kegiatan penunjang kolaborasi yang mengharuskan adanya aktor – aktor yang kompeten. Hal ini selaras dengan pernyataan dari (Ansell & Gash, 2007) bahwa ada beberapa persyaratan terciptanya proses kelaborasi mulai dari ada keterlibatan dari para pemangku kepentingan, ada kondisi yang mendorong kesetaraan kekuasaan, dan ada aktor-aktor kompeten yang terlibat.

Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak objek wisata, salah satunya Wisata religi di Makam Sunan Bonang terletak di Jl. Bonang, Dusun Kauman, Gang IV, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur (Karlasari, 2023). Makam Sunan Bonang terletak dekat dengan Alun-alun Kota Tuban. Kegiatan yang berkaitan dengan wisata religi makam ini mencakup unsur spiritual dan sejarah. Kegiatan spiritual dilakukan di Masjid Astana, tempat para peziarah biasanya melakukan salat dan membaca Al-Qur'an sambil menunggu ziarah, selain itu masjid juga digunakan untuk salat berjamaah. Pengelola juga secara rutin menyelenggarakan acara istighosah pada malam Selasa dan Rabu. Kegiatan spiritual ini dilakukan di halaman pertama dan kedua kompleks makam Sunan Bonang (Allan dan Karmilah, 2017:93). Lebih lanjut, Allan dan Karmilah (2017:94) menyebutkan bahwa kegiatan sejarah lebih banyak dilakukan dengan ziarah ke makam, sebagai bentuk mengenang jasa Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang telah menjadi tujuan populer bagi pengunjung yang mencari pengalaman religius, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan selama tiga tahun terakhir.

Menurut data dari Sofyana (2023) dalam (BlokTuban.com,2023) jumlah pengunjung wisata religi makam sunan bonang tahun 2020 berjumlah 2.896.453 orang kemudian 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding tahun 2021, hal ini didapati dalam satu tahun terakhir jumlah kunjungan wisata religi makam sunan bonang mencapai 5.403.804 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata religi makam sunan bonang hanya mencapai 3.413.900 pengunjung. Pernyataan

tersebut selaras dengan penuturan Jamal Ghofir selaku Wakil Sekretaris Yayasan Mabbarot Sunan Bonang yang dikutip oleh (Novriansyah, 2022) yang mana pada tahun 2022 pengunjung Makam Sunan Bonang meningkat hingga 80 % dibanding tahun sebelumnya, beliau mengatakan “Terhitung sejak bulan Rajab hingga Sya’ban kemarin, mengingat diukanya pintu pariwisata khususnya lalu lintas pariwisata keagamaan semakin membludak, kunjungan ke Makam Sunan Bonang tahun ini meningkat hingga 80% dibanding tahun sebelumnya”. Menurut keterangan tersebut, Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menyebutkan bahwa tempat wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil bumi yang menjadi tujuan atau sasaran kunjungan wisatawan.

Menjadi obyek wisata religi yang digandrungi oleh banyak wisatawan, Wisata Religi Sunan Bonang tidak lepas dari kolaborasi tata kelola pemerintahan (*collaborative governance*) pada bidang pengelolaan wisata, dalam mengelola sektor pariwisata religi makam sunan bonang ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban yang berperan sebagai penyelenggaraan serta penyedia fasilitas fasilitas pendukung di Wisata religi makam sunan bonang berkolaborasi dengan BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai pengawas serta Yayasan Mabbarot Sunan Bonang yang berperan sebagai pengelola dan merawat sarana dan prasarana yang ada (Wicaksono & Idajati, 2019).

*Collaborative governance* Wisata Religi Makam Sunan Bonang ditampakkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berupa sarana penunjang wisata yakni berupa Gazebo, sarana Peribadatan yang disediakan oleh pihak pengelola berupa Mushola, sarana penjualan yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban berupa pertokoan yang menjual barang – barang bertema Islami serta oleh – oleh khas tuban berupa batik, kaos dan lain sebagainya, dan yang terakhir ialah sarana Sanitasi Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai bentuk sinergitas pengembangan pariwisata, *collaborative governance* juga ditampakkan melalui sinergitas masyarakat sekitar pariwisata untuk menunjang perekonomian dengan menyediakan penyewaan toilet umum berbayar untuk wisatawan (Wicaksono & Idajati, 2019). Dengan masyarakat yang ikut andil memanfaatkan potensi wisata Sunan Bonang maka

akan membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap menjadikan efektifitas *collaborative governance* yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan obyek wisata berjalan dengan baik sehingga para wisatawan mampu menanamkan minatnya secara terus – menerus untuk mengunjungi Wisata Religi Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. Namun dengan berjalannya pelaksanaan *collaborative governance* baik dan efektif tidak dipungkiri masih adanya permasalahan dalam pengembangan pariwisata religi makam sunan bonang Tuban. *Pertama*, permasalahan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARD) Kabupaten Tuban tahun 2017 – 2037 lingkungan wisata religi makam sunan bonang memiliki permasalahan berupa akses menuju makam utama yang terhambat karena banyaknya UMKM yang berjualan di sepanjang jalan. Hal ini tentunya akan menghambat mobilitas pengunjung terkait kemudahan akses utama menuju makam Sunan Bonang sehingga pengunjung acap kali merasakan kurang nyaman karena para UMKM membuat jalur utama makam Sunan Bonang menjadi Kotor dan sempit. *Kedua*, permasalahan terjadi pada tidak teraturnya penataan lalu lintas di tengah wisata religi makam Sunan Bonang hal ini disebabkan karena mobilitas ratusan Becak Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang hampir setiap hari memadati arus jalan KH Mustain sampai dengan Jl AKBP Suroto yang mana kemacetan pada kedua titik persimpangan jalan tersebut tidak hanya memicu kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas namun juga melumpuhkan aktivitas masyarakat di sekitar museum, perkotaan dan sekolah di sepanjang jalur becak wisata (Jawaposradartuban.com, 2022).

*Ketiga*, penerapan tarif retribusi kumulatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada paguyuban becak wisata religi makam sunan bonang yang cukup mahal yakni mencapai 5 juta perbulan, hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah antara anggota paguyuban becak aktif dan non aktif yang masih terdata, hal ini menyebabkan ketimpangan perekonomian paguyuban becak yang kesulitan dalam membayar beban tarif retribusi tersebut (Jawaposradartuban.com, 2022). Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang***”.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang ?

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang

#### **Manfaat Penulisan**

1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan pemikiran, dan berfungsi sebagai dasar bahan referensi bagi para peneliti dan lain-lain.
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jawa, Yayasan Mabbatrot Sunan Bonang, dan masyarakat sebagai bahan perbandingan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Penelitian Terdahulu**

1. Dalam bahasa aslinya, administrasi terdiri dari kata benda *administratio* dan kata sifat *administrativus* yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi administrasi yang saat ini lebih dikenal luas oleh banyak ilmuwan dan praktisi (Wakhid, 2016:2). Sementara itu, (Afifuddin, 2010:3-4) menyatakan bahwa administrasi memiliki 5 (lima) ciri dalam metode ilmu administrasi, yaitu: (1) kehidupan sekumpulan orang, yaitu sekumpulan orang yang sama atau lebih, dan (2) kehidupan kerja sama kelompok. (3) kehidupan usaha atau proses. (4) kehidupan pengarahan dan pengelolaan dan (5) kehidupan tujuan yang disepakati.
2. Di sisi lain, publik dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki pandangan dunia dan harapan yang sama mengenai berbagai topik. "Public" dalam bahasa Inggris berarti "universal," "padat," dan "banyak orang" (Pratama, Cikusin, dan Ilyas, 2022:84). Menurut Chander dan Plano (Arlina, Noor, dan Irawan, 2020), administrasi publik adalah

proses pengelolaan dan pengarahan sumber daya dan personel publik dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Lebih lanjut, dalam buku berjudul "Defining Public Administration," Jurusan Ilmu Politik UIN Makasar (2013) mengutip pendapat Frank yang menyatakan bahwa administrasi terdiri dari dua kegiatan yang berbeda tetapi saling terkait: praktik profesional dan bidang akademik yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam manajemen publik.

3. Menurut (Ansell & Gash, 2007:454) *Collaborative governance* merujuk pada Sistem tata kelola yang memungkinkan pemangku kepentingan nonpemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan formal, musyawarah, dan berdasarkan konsensus di satu atau beberapa lembaga publik. Sasaran dari strategi ini adalah mengelola program atau aset publik secara kooperatif, serta menetapkan atau menerapkan kebijakan publik secara sukses.
4. Model *collaborative governance* merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang disertai dengan teknik perumusan kebijakan yang mana prosesnya dilaksanakan secara konsensus. Menurut (Ansell & Gash, 2008) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Collaborative governance in theory and practice*" mengemukakan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur sehingga memiliki empat indikator utama yakni : *Starting condition* (Kondisi awal), *Facilitative leadership* (Fasilitas kepemimpinan), *Institutional design* (Desain institusional), dan *Collaborative process* (Proses kolaborasi).
5. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, serta rasa takut, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang aman dan tenteram, baik secara lahir maupun batin (Sukmasari, 2020:6). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial mencakup terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara agar mereka dapat hidup layak, mengembangkan potensi diri, dan menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, istilah kesejahteraan masyarakat sering kali diidentikkan dengan konsep kesejahteraan sosial diatas (Wilensky, L, & Lebeaux, 1965) mengemukakan 2 konsep kesejahteraan yakni konsep residual dan konsep institusial.
6. (Anggraini, Ati, & Ilyas, 2023) mengartikan wisata sebagai konsep pembangunan yang menggunakan pendekatan kepariwisataan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap wilayah menyimpan potensi pariwisata yang beragam, baik yang bersumber dari kekayaan alam, warisan budaya, maupun hasil kreasi manusia. Namun, potensi tersebut sering kali belum dikelola secara optimal, sehingga diperlukan analisis kritis terhadap kebijakan, strategi pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan pemanfaatannya dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan lokal tanpa merusak ekosistem atau identitas budaya yang ada. (Kurniawan, 2013:47).

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menangkap realitas fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya, dengan menawarkan perspektif subjektif terhadap tantangan dan keadaan yang melingkupinya. Untuk mencapai hal ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif di samping analisis data kualitatif. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan secara gamblang nuansa fenomena yang dimaksud dengan judul; *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang. Menurut pendapat (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015:54) Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi manusia, realitas sosial, dan kehadiran dengan menyelidiki pengakuan individu, aspek-aspek yang sering kali luput dari metrik formal atau pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2018) yang mana dalam model tersebut mengemukakan 4 indikator yang dapat mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang. Sehingga fokus penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang diukur menggunakan 4 indikator Ansell & Gash (2018) yakni :
  - 1) Kondisi awal, yang menelaah ketimpangan dan ketidak seimbangan antar sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

- 2) Fasilitas kepemimpinan, mengkaji cara pemimpin *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang dalam mempromosikan, menyebarkan fokus pengaruh, penelaahan fasilitas dan ruang lingkup wisata religi makam Sunan Bonang
  - 3) Desain Instusional, menelaah mengenai adanya aturan dan konsistensinya, transparansi proses serta penetapan tenggat waktu *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.
  - 4) Proses Kolaboratif, menelaah proses dikusi atau dialog yang dilakukan para pemangku kesuasaan melalui tatap muka, menelaah rasa saling percaya, adanya komitmen serta hasil *output* dari *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.
2. Faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

### Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi dan wawasan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan penelitian. Dengan mengidentifikasi lokasi penelitian secara jelas, peneliti dapat menyederhanakan proses penentuan lokasi penelitian. (Putra, 2018). Sehingga lokasi penelitian pada penelitian ini terletak di Jl. Bonang Dusun Kauman Gang IV Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur.

### Sumber Data

Menurut Bungin (2013) sumber data diperoleh melalui sumber subyek penelitian, tempat penelitian dan paper yang berupa simbol. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber penelitian yakni :

- a. Sumber data primer  
Sumber data primer ini adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa adanya keikutsertaan pihak perantara. (Murdiyanto, 2020:53). Data primer penelitian ini dihasilkan melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan penelitian, yang mana informan penelitian *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Wisata Religi Makam Bonang ialah sebagai berikut : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dan Kepala Yayasan Mabbarot Sunan Bonang selaku pengurus resmi wisata pemakaman Sunan Bonang dari kalangan Nahdlatul Ulama

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari catatan pihak lain (Murdiyanto, 2020:53). Adapun sumber data sekunder penelitian ini ialah : (1) Dokumen, arsip serta laporan kegiatan resmi yang didapatkan dari informan penelitian baik dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Yayasan Mabbarot Sunan Bonang, maupun dokumentasi yang diambil oleh peneliti sendiri. (2) Buku – buku, surat kabar, *website* maupun jurnal yang menjadi literatur dan bahan bacaan bagi penulis.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

(Sugiyono, 2016) menuturkan bahwa observasi ialah teknik pengumpulan data yang berguna untuk menelaah tingkah laku manusia mulai dari proses kerja, gejala alam yang perlu untuk diamati. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dan Yayasan Mabbarot Sunan Bonang, dimana peneliti mengamati tentang *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

b. Wawancara

Menurut (Raco, 2010:116) menerangkan bahwa tujuan dilakukannya wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Sehingga pada tahap wawancara peneliti akan menyeleksi informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan wawasan relevan terkait dengan topik penelitian yang sedang dikaji yakni *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

c. Dokumentasi

Menurut (Herdiansyah, 2010:143) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif melibatkan peninjauan dan analisis dokumen yang dibuat oleh peserta studi atau pihak lain yang terkait dengan topik. Dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti tentang: *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang didapatkan melalui dokumentasi berupa foto – foto selama observasi dan materi audio dan visual yang ditampilkan dalam film dokumenter pada Mabbarot Sunan Bonang dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dan Yayasan.

**Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, & Saldana, (2014) yang mana mengemukakan 4 bentuk analisis data yakni:

1. Pengumpulan Data. Menurut Bungin (2003:70), pengumpulan data merupakan komponen penting dari proses analisis data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian untuk menelusuri mengenai *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang. Setelah data terkumpul disajikan dalam bentuk hasil studi dokumentasi dan deskripsi hasil pengamatan.
2. Kondensasi Data. Kondensasi data dapat digambarkan sebagai proses meringkas di mana penulis mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan menekankan karakteristik utama dari tema dan pola yang ada. Proses ini selesai setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan membuat rekaman dari tema penelitian *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang. Kondensasi data juga dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah peneliti tentukan sebelumnya.
3. Penyajian Data. Dalam studi ini, peneliti menggunakan ringkasan ringkas, diagram alir, koneksi kategori, dan grafik alat umum untuk menyajikan data naratif dalam penelitian untuk memamerkan temuan secara efektif mengenai *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.
4. Penarikan Kesimpulan. Penulis mencatat pola-pola yang berulang dan tema-tema yang konsisten dalam penjelasan, hubungan kausal, proposisi, dan konfigurasi yang ditemukan selama tahap kesimpulan. Analisis ini muncul dari kerja lapangan yang dilakukan untuk sebuah studi tentang *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang. Peneliti dengan tekun melaksanakan langkah kesimpulan, memastikan bahwa informasi yang diambil dari setiap kesimpulan dapat diandalkan dan valid. Kemudian melakukan proses validasi segera, meninjau kembali hasil dari catatan lapangan terbaru.

### Keabsahan Data

Sugiyono (2014) menguraikan bahwa pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa elemen kunci, termasuk pengujian kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Di antara ini, pengujian kredibilitas memainkan peran sentral ketika peneliti mengevaluasi validitas data mereka selama fase validitas data penelitian. Salah satu metode yang efektif untuk menetapkan kepercayaan data adalah melalui triangulasi. Proses ini melibatkan verifikasi informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan lintas berbagai periode waktu, teknik yang dikenal sebagai triangulasi data. Dalam konteks ini, tiga jenis triangulasi berbeda digunakan untuk meningkatkan validitas data, yaitu :

- 1) Triangulasi Sumber, Peneliti memverifikasi kredibilitas data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah menganalisis informasi ini secara menyeluruh untuk menarik kesimpulan, mereka mencari konsensus melalui pengecekan anggota yang melibatkan tiga sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2014).
- 2) Triangulasi Teknik, Keandalan data dinilai dengan membandingkannya dengan sumber yang sama melalui berbagai metode. Misalnya, observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat digunakan untuk memverifikasi data. Jika penilaian kredibilitas data menunjukkan hasil yang bertentangan, peneliti dapat berkonsultasi dengan sumber data yang relevan untuk menentukan keakuratannya.
- 3) Triangulasi Waktu, Melakukan wawancara di pagi hari, saat peserta masih segar, cenderung menghasilkan data yang lebih andal dan autentik. Pendekatan ini dapat dilengkapi dengan memverifikasi temuan melalui pengamatan, wawancara tambahan, atau berbagai metode lain dalam konteks yang berbeda. Proses ini berlanjut hingga kita menetapkan kepastian data, terutama jika hasil pengujian awal tidak konsisten.

### Pembahasan

Tata kelola kolaboratif adalah partisipasi terstruktur dari lembaga publik dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pembuatan kebijakan formal yang didorong oleh konsensus. Pendekatan ini berupaya mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik dan program aset secara efisien (Ansell dan Gash, 2007:454). Berdasarkan fokus penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti serta ditinjau melalui teori Menurut (Ansell & Gash, 2008) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Collaborative governance in theory and practice*”

yang memuat indikator teori model *collaborative governance*, sehingga memunculkan hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Kondisi Awal

Menurut Ansell & Gash (2008), kondisi awal (*starting conditions*) adalah elemen mendasar yang memengaruhi keberhasilan proses *collaborative governance*. Kondisi awal mencakup beberapa faktor utama, seperti keseimbangan sumber daya dan kekuatan antara pemangku kepentingan. Ketimpangan sumber daya dapat menyebabkan dominasi oleh pihak yang lebih kuat, sementara pihak yang lemah merasa termarginalisasi. Selain itu, sejarah hubungan sebelumnya juga berperan penting; jika terdapat konflik di masa lalu, proses kolaborasi mungkin terhambat oleh rendahnya kepercayaan. Sebaliknya, hubungan yang baik menjadi modal positif untuk memulai kerjasama.

Untuk itu pengkajian kondisi awal *collaborative governance* diperhatikan melalui telaah sejarah/kondisi awal objek penelitian hingga pada ketimpangan dan ketidak seimbangan antar sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam Sunan Bonang. Pada hasil penelitian di temukan bahwa ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya dan kapasitas tata kelola yang optimal. Perpindahan pengelolaan dari Yayasan Mabbarot ke pemerintah kabupaten pada tahun 1993 seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas melalui birokrasi yang lebih terstruktur. Namun, kegagalan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas, seperti ketidakjelasan pemasukan dan masalah hilangnya karcis, mencerminkan lemahnya tata kelola berbasis sistem. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi yang kurang efisien dapat menjadi penghambat dalam mengelola aset budaya. Sebaliknya, Yayasan Mabbarot berhasil menunjukkan peningkatan pemasukan yang signifikan ketika diberi kepercayaan untuk mengelola kembali destinasi tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas, yang didukung legitimasi sosial dan hubungan historis dengan masyarakat setempat, memiliki kekuatan tersendiri dalam mengelola situs warisan budaya secara efektif. Konflik yang terjadi antara Pemkab Tuban dan Yayasan Mabbarot menyoroti kegagalan kedua pihak dalam membangun kolaborasi yang harmonis untuk mengintegrasikan sumber daya struktural pemerintah dengan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan.

Kesenjangan ini juga memperlihatkan kurangnya pendekatan tata kelola kolaboratif yang mengedepankan dialog dan koordinasi. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan kekuatan birokrasi, tetapi juga bekerja sama dengan yayasan berbasis komunitas yang memiliki akses lebih baik ke legitimasi sosial. Dinamika ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan kekuatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya seperti situs Sunan Bonang.

## 2. Fasilitas Kepemimpinan

Adapun fasilitas kepemimpinan yang dimaksud oleh (Ansell & Gash, 2008) ialah dimana adanya fasilitas kepemimpinan merupakan sebuah tahapan atau proses kolaborasi yang diperlukan untuk menumbuhkan dan menciptakan fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh para *stakeholders*, karena untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama *stakeholders* agar tidak ada yang dirugikan diantara para *stakeholder* dan tentu dapat memfasilitasi forum diskusi.

Pada hasil temuan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang Tuban, ditemukan bahwa fasilitas kepemimpinan, seperti yang dijelaskan dalam teori Ansell & Gash (2008), telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan wisata religi Sunan Bonang di Tuban. Hal ini tercermin dari upaya pemimpin dan pemangku kepentingan untuk memfasilitasi kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi pendidikan dan kebudayaan, serta masyarakat lokal. Pemimpin di tingkat Yayasan Mabarrot Sunan Bonang, seperti Bapak Hidayat, secara aktif menjaga hubungan dengan berbagai pihak, termasuk Pemkab Tuban dan Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Upaya ini diarahkan untuk memastikan penyediaan fasilitas fisik, seperti ruang tunggu, masjid, MCK, dan gazebo, yang mendukung kenyamanan dan kepuasan peziarah. Fasilitas ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kolaborasi, tetapi juga menjadi simbol keseimbangan pelayanan antara pemerintah daerah sebagai tuan rumah dan pengelola lokal sebagai fasilitator utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga juga memainkan peran kunci dalam mendukung kolaborasi ini dengan menyediakan fasilitas fisik berbasis dana APBD dan DAK serta mempromosikan wisata melalui platform digital "Ayo Ning Tuban."

Platform ini memungkinkan pengelola destinasi untuk mempromosikan wisata secara mandiri, yang mencerminkan inovasi dalam kolaborasi.

Selain itu, kolaborasi lintas daerah yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti studi tiru ke tempat wisata di luar Tuban, menunjukkan peran kepemimpinan dalam memperluas jejaring promosi wisata. Kepemimpinan yang inklusif ini memastikan semua pemangku kepentingan, mulai dari pengelola hingga masyarakat lokal, terlibat dalam mendukung tujuan bersama. Berdasarkan analisis ini, fasilitas kepemimpinan dalam pengelolaan wisata religi makam sunan bonang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Ansell & Gash, yaitu membangun kepercayaan, memediasi konflik, menciptakan dialog inklusif, dan mengarahkan kolaborasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata religi tetapi juga memperkuat keberlanjutan pengelolaannya.

## 3. Desain Intuisi

Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa desain institusional harus memberikan ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dan mendorong adanya kesepakatan konsensus yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Selain itu, desain institusional harus memperhatikan faktor-faktor seperti ketersediaan waktu dan ruang untuk interaksi, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara efektif. Dengan desain institusional yang baik, kolaborasi lintas sektor dapat mencapai tujuan bersama secara efisien, tanpa adanya dominasi dari satu pihak tertentu.

Dalam observasi ini desain intuisi yang ditampilkan pada kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dengan Yayasan Mabarrot Sunan Bonang, aturan dan prosedur yang digunakan kedua belah pihak mencerminkan perbedaan peran dan tanggung jawab mereka. Tidak adanya aturan dan prosedur bersama dalam kolaborasi ini disebabkan oleh pembagian wewenang yang jelas antara kedua pihak. Dinas Pariwisata bertindak sebagai pendukung atau fasilitator, berperan membantu pengembangan pariwisata melalui kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur kegiatan di dalam kawasan wisata religi Sunan Bonang karena pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah Yayasan Mabarrot. Sebaliknya, Yayasan Mabarrot sebagai pengelola utama makam

Sunan Bonang menetapkan aturan dan prosedur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) yayasan. ADART tersebut menjadi landasan operasional yang mengatur berbagai aspek pengelolaan, mulai dari standar pelayanan, pengaturan pedagang, hingga koordinasi dengan para pekerja, seperti pemandu ziarah dan juru kunci. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peziarah memenuhi standar yang telah ditentukan, menciptakan suasana yang nyaman dan tertib.

Meskipun tidak ada aturan bersama, kedua pihak menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam mendukung keberhasilan wisata religi Sunan Bonang. Dinas Pariwisata mendukung melalui fasilitasi, seperti promosi pariwisata dan pengelolaan fasilitas publik, sementara Yayasan Mabarrot fokus pada operasional dan pengelolaan internal kawasan makam. Pendekatan ini mencerminkan desain institusional yang memisahkan namun saling melengkapi, dengan Dinas Pariwisata bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dan Yayasan Mabarrot berperan sebagai pelaksana utama. Kerjasama semacam ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan peran dan pemahaman konteks awal dalam tata kelola kolaboratif, sehingga kolaborasi tetap berjalan meskipun tanpa aturan formal yang mengikat kedua belah pihak secara langsung. Desain institusional dalam kolaborasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Ansell & Gash karena tidak adanya kerangka prosedur atau aturan formal yang menyatukan kedua pihak. Hal ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi tantangan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Namun, kolaborasi tetap dapat berjalan karena adanya pemisahan peran yang saling melengkapi. Dinas Pariwisata bertindak sebagai pendukung strategis dari pemerintah daerah, sementara Yayasan Mabarrot memimpin operasional langsung di lapangan.

#### 4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008) merujuk pada faktor-faktor yang menunjukkan kualitas dan efektivitas dari suatu proses kolaboratif antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena, itu dalam pembahasan ini peneliti akan mengulas proses kolaborasi yang berfokus pada diskusi atau dialog yang dilakukan para pemangku kesusuaan melalui tatap muka, menelaah rasa saling percaya, adanya komitmen serta hasil *output* dari *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Sunan Bonang.

Pada hasil observasi ditemukan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dengan Yayasan Mabarrot Sunan Bonang berlangsung melalui mekanisme dialog atau diskusi yang dirancang untuk memfasilitasi sinergi dan penyelesaian masalah bersama. Forum diskusi, seperti rapat koordinasi (Rakor) tahunan, menjadi medium utama untuk mendiskusikan strategi pengembangan dan promosi wisata religi. Dalam forum ini, para pemangku kepentingan, termasuk pengurus berbagai makam dan organisasi terkait seperti Pemangku Persatuan Makam Aulia (PPMA), diundang untuk berpartisipasi. Proses ini menekankan pentingnya konsensus dan musyawarah umum dalam menghadapi perbedaan pendapat, dengan fokus pada visi bersama untuk memajukan destinasi wisata di Tuban. Kolaborasi juga didukung oleh kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang rutin dan inklusif, baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti melalui pertemuan antar pengurus makam dan koordinasi dengan PPMA 9 Wali. Meskipun perbedaan pandangan sering muncul, kesepakatan kolektif menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan yang disepakati secara massal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada upaya aktif untuk menjaga dialog terbuka, mengelola konflik, dan memastikan keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diskusi atau dialog ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menciptakan ruang bagi keberlanjutan sinergi yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan citra serta kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Proses kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dengan Yayasan Mabarrot Sunan Bonang sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) tentang *Collaborative Governance*. Dalam kolaborasi ini, forum diskusi seperti rapat koordinasi tahunan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan mencapai konsensus di antara berbagai pihak, termasuk pengurus makam dan organisasi terkait. Meskipun ada perbedaan pendapat, proses musyawarah umum digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai keputusan bersama. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi terbuka dan inklusif,

sementara komitmen bersama untuk memajukan wisata religi di Tuban terlihat jelas. Kolaborasi ini tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga pada dinamika hubungan antar aktor yang mendukung tujuan bersama, yang mencerminkan prinsip-prinsip kolaboratif dalam teori Ansell dan Gash.

Dalam pelaksanaannya *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat . adapun faktor pendukung yang peneliti temukan dalam kajian *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang ialah sebagai berikut:

1. Antusias pengunjung, Fluktuasi jumlah pengunjung yang datang di destinasi wisata sangat memengaruhi pendapatan masyarakat. Puncak kunjungan pada bulan-bulan tertentu, seperti Rajab dan Sya'ban, mampu mendatangkan hingga 20.000 pengunjung per hari. Masyarakat sekitar yang bergerak di sektor UMKM, transportasi lokal, dan penyedia akomodasi merasakan dampak ekonomi positif secara langsung. Misalnya, Bapak Dzikri, pemilik penginapan, mencatat pendapatan hingga Rp15–20 juta per bulan selama musim ramai. Sehingga antusias pengunjung yang kian membludak dapat memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan ekonomi pelaku usaha di sekitar area makam sunan bonang tuban. Peningkatan jumlah wisatawan juga memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang tercermin dalam peningkatan PDB dan PDRB Kabupaten Tuban.
2. Kelengkapan fasilitas, fasilitas di area wisata religi sunan bonang telah mencapai tingkat kelengkapan yang cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas yang optimal adalah hasil kolaborasi lintas sektor, melibatkan Pemerintah Kabupaten Tuban, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Yayasan Mabarrot Sunan Bonang sebagai pengelola. Pernyataan Ibu Umi dari Dinas Pariwisata menggarisbawahi upaya yang telah dilakukan, termasuk perbaikan akses jalan dan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Tuban untuk menjaga kelancaran transportasi, terutama saat kunjungan membludak. Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Fasilitas seperti tempat makan, toilet, tempat wudhu, masjid, gazebo untuk istirahat, dan keberadaan pemandu wisata memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Pengelolaan ini tidak lepas dari kolaborasi antara Pemerintah

Kabupaten Tuban, Dinas Pariwisata, dan Yayasan Mabarrot Sunan Bonang, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Adanya Sumber Dana yang Memadai, kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban serta Yayasan Mabarrot Sunan Bonang mencerminkan model pengelolaan yang memanfaatkan sumber dana berbeda tetapi tetap selaras dalam tujuan, yaitu pelestarian cagar budaya dan peningkatan daya tarik wisata. Dinas Pariwisata mengandalkan dana APBD untuk membiayai program pelestarian dan pengembangan destinasi dengan alokasi dana signifikan, sementara Yayasan Mabarrot mengelola dana berbasis infaq dari peziarah secara mandiri, menunjukkan pendekatan non-komersial yang berbasis keikhlasan. Meskipun mengungkap perbedaan mekanisme dalam sumber dana, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban serta Yayasan Mabarrot Sunan Bonang tetap memiliki cerminan upaya kebersamaan (kolaborasi) dalam menjaga kawasan wisata religi makam sunan bonang, meningkatkan kualitas serta layanan yang di sediakan.

Kemudian adapun faktor penghambat pelaksanaannya *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang ialah sebagai berikut:

1. Mobilitas becak wisata yang tidak terkendali, masalah mobilitas becak wisata di kawasan Makam Sunan Bonang Tuban mencerminkan ketidakteraturan pengelolaan transportasi yang berdampak pada ketidak lancaran arus lalu lintas, terutama pada waktu-waktu ramai seperti akhir pekan atau saat acara keagamaan (Haul). Ketidakmampuan dalam mengatur jalur dan jumlah becak yang melebihi kapasitas jalan menyebabkan kemacetan yang mengganggu kenyamanan wisatawan dan aktivitas masyarakat sekitar. Hal ini juga menciptakan persaingan ketat di kalangan pengayuh becak yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka, di mana banyak pengayuh yang memperoleh pendapatan rendah akibat banyaknya becak yang beroperasi. Meskipun tarif yang ditetapkan tergolong murah dan tidak memberatkan pengunjung, ketidakpastian kebijakan yang berubah-ubah, serta kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, semakin memperburuk kondisi pengayuh becak yang merasa tidak mendapat dukungan dan perhatian yang memadai, seperti yang diungkapkan oleh para pengayuh becak dalam wawancara. Oleh karena itu, diperlukan penataan yang lebih baik dalam pengelolaan

becak wisata, serta kebijakan yang lebih konsisten dari pemerintah daerah agar dapat menciptakan keseimbangan antara kenyamanan wisatawan dan kesejahteraan pengayuh becak, serta mencegah dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

2. Aktivitas pemalakan pengemis dan penjual parfum, permasalahan yang terjadi di kawasan wisata Makam Sunan Bonang Tuban menggambarkan kompleksitas isu sosial dan ekonomi yang saling terkait. Aktivitas pemalakan yang melibatkan pengemis, penjual parfum, dan penyedia fasilitas seperti penyewaan kamar mandi, memberikan dampak negatif terhadap kenyamanan pengunjung. Para pengunjung atau peziarah sering kali merasa terganggu oleh praktik-praktik pemaksaan yang dilakukan oleh penjual parfum dan pengemis, seperti pendekatan agresif untuk menawarkan barang dagangan atau meminta uang secara paksa. Selain itu, terdapat juga pemaksaan dari penyedia fasilitas umum yang mengharuskan pengunjung menggunakan kamar mandi mereka.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang di Kabupaten Tuban memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Yayasan Mabarrot Sunan Bonang, UMKM lokal, serta masyarakat menunjukkan hasil positif dalam pengembangan fasilitas wisata dan penyediaan layanan yang mendukung kenyamanan pengunjung. Kolaborasi ini sesuai dengan prinsip Ansell & Gash (2008) yang telah memenuhi empat indikator berikut :

1. Kondisi Awal, yang menunjukkan bahwa pada kondisi awal terdapat sumber daya dan lemahnya tata kelola birokrasi pemerintah Kabupaten Tuban, seperti masalah akuntabilitas dan pengelolaan aset, menjadi hambatan besar dalam pengelolaan Wisata religi makam sunan bonang. Sebaliknya, Yayasan Mabarrot, dengan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan sosial dan hubungan historisnya, mampu meningkatkan pemasukan dan efektivitas pengelolaan. Konflik antara pemerintah dan yayasan menggarisbawahi pentingnya tata kelola kolaboratif berbasis dialog, integrasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya.
2. Fasilitas Kepemimpinan, dalam pelaksanaan *collaborative governance* untuk mensejahterakan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang. fasilitas kepemimpinan

yang disuguhkan telah mencapai kondisi lengkap dan baik yang mana fasilitas ini tersedia atau disediakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban), dan Yayasan Mabarrot. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dan Yayasan Mabarrot bekerja bersama untuk menyediakan fasilitas fisik seperti ruang tunggu, masjid, dan gazebo, serta memanfaatkan platform digital "Ayo Ning Tuban" untuk promosi wisata.

3. Desain Intuisi, dalam kolaborasi Wisata Religi Sunan Bonang mencerminkan pembagian peran yang saling melengkapi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarrot, meskipun tanpa aturan formal bersama. Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator strategis melalui kebijakan pemerintah daerah, sedangkan Yayasan Mabarrot menetapkan aturan operasional berdasarkan ADART untuk memastikan pelayanan yang tertib.
4. Proses Kolaborasi, proses kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarrot Sunan Bonang ditunjukkan dengan adanya diskusi seperti rapat koordinasi tahunan, para pemangku kepentingan membahas strategi pengembangan wisata dan menyelesaikan perbedaan pandangan secara musyawarah. Komunikasi yang rutin dan inklusif memperkuat kepercayaan, sementara komitmen bersama untuk memajukan wisata religi menjadi fondasi keberlanjutan sinergi. Proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada dinamika hubungan yang aktif dan inklusif, bukan hanya pada struktur formal.

Dalam penelaahan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang peneliti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam kajian ini seperti:

1. Faktor pendukung, adanya antusias pengunjung yang mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat sekitar dan memperkuat kunjungan destinasi wisata religi makam sunan bonang sehingga peningkatan jumlah wisatawan ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang tercermin pada PDB dan PDRB Kabupaten tuban. Kemudian, faktor pendukung selanjutnya ialah kelengkapan fasilitas, yang mana fasilitas yang ada di area wisata religi makam sunan bonang telah mencapai kelengkapan yang cukup baik dimana hal ini ditunjukkan pada kelengkapan beberapa fasilitas seperti seperti tempat makan, toilet, tempat wudhu, masjid, gazebo untuk istirahat, dan keberadaan pemandu wisata memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Yang terakhir ialah adanya sumber dana kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarrot menggabungkan dana APBD

- untuk pelestarian dan pengembangan serta infaq berbasis keikhlasan dari peziarah, menunjukkan integrasi sektor publik dan yayasan dalam menciptakan kesejahteraan. Kolaborasi ini mencerminkan upaya bersama dalam melestarikan cagar budaya sekaligus meningkatkan kualitas layanan, yang selaras dengan pandangan bahwa kesejahteraan memerlukan sinergi lintas sektor dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Faktor penghambat, dimana di temukan bahwa hal ini ditengarai oleh tantangan signifikan wisata religi makam sunan bonang, seperti kemacetan lalu lintas akibat mobilitas becak wisata yang tidak teratur, penataan UMKM yang menghambat akses ke lokasi makam, serta penerapan retribusi yang membebani sebagian pihak yakni pengayuh becak wisata religi makam sunan bonang. Masalah-masalah lain juga muncul dari adanya praktek pemalakan yang dilakukan oleh pengemis dan penjual parfum begitupun dengan aksi pemaksaan penyewa MCK yang memaksakan peziarah untuk menggunakan atau menyewa toiletnya hal inii menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terkoordinasi dan inklusif, yang mencakup partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala yang ada.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, adapun saran yang diharapkan untuk mengatasi hampatan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam menjalankan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu mengatur mobilitas becak wisata dengan menetapkan jalur khusus dan kapasitas maksimum yang dapat beroperasi setiap harinya di kawasan makam. Sehingga perlu juga pembenahan pada area alternatif khusus shuttle bus yang di tetapkan untuk mengurangi kemacetan di sekitar wisata
2. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan penyesuaian tarif retribusi untuk paguyuban becak wisata religi makam sunan bonang agar lebih menekankan proposionalitas dengan pendapatan mereka, yang dilakukan melalui forum diskusi untuk lebih menjaga rasa keadilan dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pemerintah dan Yayasan Mabarroto perlu meningkatkan kolaborasi dalam menambah fasilitas umum seperti toilet, tempat istirahat, dan area parkir yang memadai untuk mengatasi lonjakan pengunjung pada waktu-waktu tertentu.
4. Pemerintah dan Yayasan Mabarroto perlu menekankan kolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan atau dengan Polres Kabupaten Tuban dalam hal pengawasan aktivitas atau praktik-praktik yang mengganggu kenyamanan pengunjung, seperti pemaksaan dari pedagang parfum atau pengemis. Dan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan seperti halnya praktek pemalakan.

## Daftar Pustaka

- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Allan, L. M., & Karmilah, M. (2017). Pengaruh Aktivitas Ziarah Terhadap Ruang Publik Alun - Alun Studi Kasus : Kawasan Pemakaman Sunan Bonang. *Jurnal Planologi Vol. 4 No. 2* , 89-101.
- Anggraini, F. S., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik, Vol. 17 No. 6*, 30-49.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice . *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arlina, E. S., Noor, H. M., & Irawan, B. (2020). Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. *e-Jurnal Administrasi Publik*, 9415-9427.
- BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. (2023, September 4). *Januari-Juli 2023, Kunjungan Wisman Meningkat 489,48 persen Dibandingkan Tahun Lalu*. Diambil kembali dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur: <https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/09/04/januari-juli-2023-kunjungan-wisman-meningkat-48948-persen-dibandingkan-tahun-lalu/> (diakses pada 09 Januari 2024)
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departement Of Political Science UIN Makassar. (2013). *Proceedings International Conference on Islam, Politics, Laws dan Social Sciences*. Makassar : Kedai Aksara .
- Hariadi, A. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba*

- [Skripsi]. Makassar: Repository Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Humanika.
- Hutami, S. Y. (2022). *Analisis Collaborative Government Dalam Pengkoordinasian Obyek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi [Skripsi]*. Jambi: Universitas Jambi.
- Imaniar, D., & Wahyudiono, A. (2019). Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik*.
- Jawaposradartuban.com. (2022, Februari 21). *Tiap Hari Macet, Mungkinkah Sepanjang Jalan Becak ini Dipasang Median?* Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Tuban.
- Karlasari, D. N. (2023, Mei 26). *Wisata Religi di Masjid Agung Tuban Tempat Sunan Bonang Mengajarkan Agama Islam* . Diambil kembali dari KilasKlaten.com: <https://klaten.pikiran-rakyat.com/melancong/pr-2416701480/wisata-religi-di-masjid-agung-tuban-tempat-sunan-bonang-mengajarkan-agama-islam>
- Kurniawan. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kebupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 1*.
- Maryani, U. S., Muchsin, S., & Ilyas, T. R. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau Ruang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ruang Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Kantor Koordinator Pariwisata dan Masyarakat Kecamatan Riung). *Jurnal Respon Publik Vol. 15 No. 5*, 58-63.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3*. USA: Sage Publication, Inc.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Novriansyah, R. (2022). *Jelang Ramadha, Peziarah Makam Sunan Bonang Meningkat Pesat*. Tuban: I News Tuban.
- Pratama, D. A., Cikusin, Y., & Ilyas, T. R. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Respon Publik. Vol. 16, No. 7*, 82-90.
- Putra, A. E. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tantang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mlang Bidang Pertamanan [Skripsi])*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* . Jakarta: PT. Grasindo.
- Sofyana, S. W. (2023, Januari 10). *Selama Tahun 2022 Sebanyak 2.296.033 Orang Kunjungi Makam Sunan Bonang*. Diambil kembali dari BlokTuban.com: <https://bloktuban.com/2023/01/10/selama-tahun-2023-sebanyak-2-296-033-orang-kunjungi-makam-sunan-bonang/>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Prespetif Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an and Hadist Studies Vol. 3 No. 1*, 1-16.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa (Prinsip, Penerapan, penelitian)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wakhid, A. A. (2016). *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing (Anggota IKAPI).
- Wicaksono, W. A., & Idajati, H. (2019). Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang Berdasarkan Komponen Wisata Religi. *Jurnal Teknik ITS Vol. 8 No. 2*, 157-161.
- Wilensky, L. H., & Lebeaux, C. (1965). *Industrial Society and Social Welfare*. New York: The Free Press.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia [Tesis]*. Surabaya: Repository Universitas Airlangga Surabaya.
- Zaenuri, M. (2017). *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman (Tesis)*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.

#### **Undang-Undang:**

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Undang – Undang Republik Indonsia No. 11 Tahun  
2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016  
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tuban